

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Kajian Pustaka .....	10
1.5.1. Keuangan Negara .....	10
1.5.2. Bendahara .....	14
1.5.3. Jabatan Fungsional .....	15
1.5.4. Prinsip <i>Good Governance</i> .....	17
1.6. Metode Penelitian .....	22
1.6.1. Tipe Penelitian .....	22
1.6.2. Pendekatan Masalah .....	23

1.6.3. Sumber bahan hukum .....	24
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	25
1.6.5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	26
1.7. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II JABATAN FUNGSIONAL DALAM KONTEKS</b>	
<b>KEDUDUKAN BENDAHARA .....</b>	<b>28</b>
2.1. Jabatan Fungsional .....	28
2.2. Bendahara .....	34
2.2.1. Konsep Bendahara .....	34
2.2.2. Pengangkatan Bendahara Dalam Jabatan Fungsional .....	39
2.2.3. Kedudukan Bendahara .....	46
<b>BAB III PRINSIP <i>GOOD GOVERNANCE</i> DALAM PENGELOLAAN</b>	
<b>KEUANGAN NEGARA .....</b>	<b>55</b>
3.1. <i>Good Governance</i> .....	55
3.1.1. Konsep <i>Good Governance</i> .....	55
3.1.2. <i>Good governance</i> dalam pelaksanaan APBN .....	60
3.2. Pengelolaan Keuangan Negara .....	72
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
4.1. Kesimpulan .....	85
4.2. Saran .....	86
<b>DAFTAR BACAAN</b>	

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

*Indische Comptabiliteitswet* (ICW) *Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448/Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Pemeriksaan Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2776);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4560);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235).



## DAFTAR TABEL

Tabel I. Konsep Pemisahan Kewenangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara .....	36
Tabel II. Kedudukan Bendahara Pasca Berlakunya UU Perbendaharaan Negara .....	54
Tabel III. Penjabaran Konsep <i>Good Governance</i> .....	59

